Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi
Volume 6 Nomor 2 Juli 2026
e-ISSN: 2809-7793; p-ISSN: 2827-8119, Hal 490-505
DOI: https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i2.2288
Tersedia: https://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/index

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SPI, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD di Kota Medan)

Siti Sri Wahyuni[1*], Yulita Triadiarti[2], Muhammad Rizal[3], Tapi Rumondang Sari Siregar[4], Khairunnisa Harahap[5]

[1] Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
[2,3,4,5] Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Alamat: Williem Iskandar Psr V, Medan Estate, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
*Penulis Korespondensi: sitisriwahyuni301@gmail.com

Abstract. *This study was designed to investigate the extent to which Information Technology Utilization, Implementation of Internal Control Systems, and Accessibility of Financial Reports contribute to the Accountability of Regional Financial Management among Regional Government Organizations (OPDs) in Medan City. Accountability in regional financial management continues to face numerous challenges, including weaknesses in internal control systems and technical obstacles in the financial reporting process. A quantitative approach was employed in this study, involving 32 OPDs as samples selected through simple random sampling technique. Data were gathered using Likert scale questionnaires and subsequently analyzed using multiple linear regression analysis. The partial test results revealed that only the Implementation of Internal Control Systems exerted a significant influence and emerged as the dominant variable, whereas Information Technology Utilization and Accessibility of Financial Reports demonstrated no considerable effect. Meanwhile, simultaneously, all three variables collectively proved to have a significant effect. These findings underscore the importance of strengthening the internal control system as the primary priority, which needs to be supported by improved utilization of information technology and broader accessibility of financial reports down to the individual OPD level.*
Keywords: *Regional Financial Management Accountability, Information Technology Utilization, Implementation of Internal Control Systems, Accessibility of Financial Reports*

Abstrak. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji sejauh mana Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, serta Aksesibilitas Laporan Keuangan berkontribusi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD di Kota Medan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, di antaranya kelemahan pada sistem pengendalian intern serta hambatan teknis dalam proses pelaporan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan melibatkan 32 OPD sebagai sampel yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert, kemudian diolah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya Penerapan SPI yang memberikan pengaruh signifikan dan tampil sebagai variabel dominan, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Adapun secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem pengendalian internal sebagai prioritas utama, yang perlu didukung dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi serta perluasan aksesibilitas laporan keuangan hingga ke tingkat OPD secara individual.
Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan *good governance* yang menuntut pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik secara

Naskah Masuk: 12 Maret 2026; Revisi: 12 Mei 2026; Diterima: 12 Juni 2026; Tersedia: 12 Juli 2026; Terbit: 30 Juli 2026;

transparan dan efektif. Di tingkat daerah, hal ini diatur melalui berbagai regulasi seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan diskrepansi. Data IHPS BPK Semester I Tahun 2024 mencatat 945 permasalahan sistem pengendalian intern pada laporan keuangan pemerintah (Warta BPK, 2024). Di Kota Medan, fenomena ini diperkuat dengan adanya kasus penyimpangan anggaran di beberapa dinas dalam kurun waktu 2023-2024(Mandailing, 2021; Rahmadani, 2025; Waspada, 2025), serta kendala teknis pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menghambat efisiensi pelaporan.

Secara teoretis, akuntabilitas pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan TI, SPI, dan aksesibilitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas data dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi, sementara pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap penyimpangan. Di sisi lain, aksesibilitas menjamin keterbukaan informasi bagi publik sesuai amanat UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008. Meski demikian, terdapat inkonsistensi hasil penelitian (*research gap*). Pemanfaatan teknologi informasi ditemukan berpengaruh signifikan Marlina, Rahmayanti, dan Futri (2021), namun berbanding terbalik dengan temuan Riyadi dan Kurnadi (2020). Demikian pula pada variabel sistem pengendalian internal dan aksesibilitas hasil yang diperoleh masih bersifat tidak konsisten serta saling berkontradiksi antara satu kajian dengan kajian lainnya (Puspitawati dan Effendy, 2021; Shadrina dan Hidajat, 2023).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan ketiga variabel tersebut diintegrasikan secara simultan ke dalam satu model komprehensif pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang banyak berfokus pada pemerintah desa atau kabupaten, penelitian ini menyoroti kompleksitas pengelolaan keuangan di kota metropolitan pasca implementasi penuh SIPD berbasis akrual. Dengan demikian, analisis pengaruh pemanfaatan TI, penerapan SPI, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan, merupakan sasaran yang ingin diraih dalam penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Keagenan

Hubungan kontraktual di mana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen dijabarkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Hoesada (2021) melalui teori keagenan. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai prinsipal dan OPD sebagai agen (Zimmerman, 1977). Permasalahan utamanya adalah asimetri informasi yang memicu *moral hazard* dan *adverse selection* (Ikhsan dkk., 2016), sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan sistem informasi yang efektif sebagai instrumen untuk mewujudkan akuntabilitas.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kepada prinsipal merupakan kewajiban yang diemban agen dalam akuntabilitas (Mahsun, 2006), yang mencakup seluruh tahapan dari perencanaan hingga pengawasan secara transparan kepada masyarakat dan DPRD (Priscilla, Taufik, dan Al Azhar, 2022). Akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan merupakan empat dimensi yang dikemukakan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018)

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Sutabri (2014), dukungan terhadap pengambilan keputusan dapat diwujudkan melalui teknologi informasi yang mampu mengolah dan menyebarkan informasi secara relevan, akurat, dan tepat waktu. yang diwujudkan melalui SPBE dan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatannya mencakup lima komponen, yaitu *hardware*, *software*, jaringan komunikasi data, *database*, serta personalia teknologi informasi (Suyanto, 2005) yang secara bersama-sama berperan mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan (Aziiz dan Prastiti, 2019). Pemanfaatan TI ditemukan memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas oleh Marlina dkk. (2021), namun tidak signifikan oleh Riyadi dan Kurnadi (2020).

D. Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Keyakinan memadai atas efektivitas operasi, kredibilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 sebagai mekanisme terpadu yang berlangsung secara berkelanjutan. SPIP tersusun atas lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan *(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),* 2013). Mahmudi (2016) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah bergantung pada efektivitas pengendalian internal yang diterapkan. Sistem pengendalian internal ditemukan berpengaruh signifikan oleh Puspitawati dan Effendy (2021), Priscilla dkk. (2022), serta Fuad dan Winarsih (2021), namun tidak signifikan menurut Defana dan Rahayu (2023).

E. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Keterjangkauan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan yang disediakan oleh penyelenggara pemda merupakan definisi aksesibilitas laporan keuangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006), yang diukur melalui keterbukaan di media massa, kemudahan akses daring, dan ketersediaan informasi yang memadai (Sande, 2013 dalam Mudjiyono dan Iswahyuni, 2019). Aksesibilitas yang baik memperkuat kontrol eksternal dan mendorong transparansi (Fauziyah dan Handayani, 2017). Aksesibilitas laporan keuangan ditemukan memberikan pengaruh signifikan oleh Fuad dan Winarsih (2021) dan Priscilla dkk. (2022), namun tidak signifikan menurut Shadrina dan Hidajat (2023).

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada ketiga variabel tersebut mendorong pengujian empiris lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini diduga bahwa pemanfaatan TI, penerapan SPI, dan aksesibilitas laporan keuangan, baik secara parsial maupun simultan, memberikan pengaruh positif terhadap APKD pada OPD di Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dipilih dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2023), penelitian dilaksanakan pada OPD di Kota Medan. Sebanyak 52 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebagai populasi penelitian. Sampel ditetapkan minimal 30 OPD menggunakan teknik *simple random sampling*, dengan responden Kepala Subbagian Keuangan atau Ketua Tim Keuangan pada setiap OPD yang berkontribusi langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner berskala Likert lima

poin. Pemanfaatan teknologi informasi (X1), penerapan SPI (X2), dan aksesibilitas laporan keuangan (X3) berperan selaku variabel bebas, sementara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) selaku variabel terikat.

Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda merupakan teknik analisis data yang diterapkan dengan model berikut:

$$APKD = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dengan: APKD adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, *a* adalah konstanta, b_1 hingga b_3 adalah koefisien regresi tiap-tiap variabel bebas, X_1 ialah pemanfaatan teknologi informasi, X_2 ialah penerapan SPI, X_3 ialah aksesibilitas laporan keuangan, dan *e* adalah *error*. Uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) difungsikan sebagai instrumen pengujian hipotesis dalam penelitian ini. (Ghozali, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini melibatkan 32 OPD sebagai sampel, di mana seluruh kuesioner yang didistribusikan dapat dikembalikan dengan tingkat pengembalian 100%, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam analisis. Berdasarkan hasil penelitian seluruh responden berpendidikan minimal S1 (78%) dan S2 (22%), dengan masa kerja dominan 6–10 tahun (53%) pada rentang usia 36–45 tahun (53%) hingga di atas 45 tahun (47%). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kompetensi akademis dan pengalaman yang memadai untuk menilai variabel-variabel penelitian secara objektif dan komprehensif.

A. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Dengan menetapkan rentang interval kelas sebesar 0,80, analisis statistik deskriptif mengklasifikasikan data ke dalam lima kategori penilaian mulai dari sangat tidak baik (1,00–1,80) hingga sangat baik (4,21–5,00). Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) memperoleh rata-rata skor 4,3559 (sangat baik), dengan nilai tertinggi pada indikator komputerisasi proses akuntansi dan kemampuan operasional pegawai terhadap SIPKD/SIPD (mean = 4,5937) dan terendah pada pembaruan sistem keamanan komputer (mean = 4,0000). Variabel penerapan sistem pengendalian internal (X2) memperoleh rata-rata skor 4,3620 (sangat baik), baik), dengan nilai tertinggi pada indikator dukungan bukti transaksi yang valid dan sah (mean = 4,5000) dan terendah pada pengelolaan

toleransi risiko (mean = 4,2188). Skor rata-rata sebesar 3,7969 (baik) diperoleh oleh variabel aksesibilitas laporan keuangan (X3), di mana skor tertinggi dicapai pada kelengkapan informasi untuk pengambilan keputusan (mean = 4,2187) dan terendah pada publikasi melalui media massa (mean = 3,3750, kategori sedang), mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi keuangan melalui media publik masih perlu ditingkatkan. Skor rata-rata sebesar 4,4188 (sangat baik) dicapai oleh variabel APKD (Y), dengan nilai tertinggi pada penyampaian rancangan APBD kepada DPRD (mean = 4,5313) dan terendah pada pengungkapan ketidaktercapaian target (mean = 4,1563, kategori baik).

B. Hasil Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{tabel} (0,3494)	r_{hitung}	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Y1	0,349	0,856	Valid
	Y2	0,349	0,845	Valid
	Y3	0,349	0,653	Valid
	Y4	0,349	0,790	Valid
	Y5	0,349	0,807	Valid
	Y6	0,349	0,752	Valid
	Y7	0,349	0,797	Valid
	Y8	0,349	0,725	Valid
	Y9	0,349	0,898	Valid
	Y10	0,349	0,860	Valid
	Y11	0,349	0,866	Valid
	Y12	0,349	0,831	Valid
	Y13	0,349	0,767	Valid
	Y14	0,349	0,803	Valid
	Y15	0,349	0,811	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X1.1	0,349	0,716	Valid
	X1.2	0,349	0,703	Valid
	X1.3	0,349	0,717	Valid
	X1.4	0,349	0,584	Valid
	X1.5	0,349	0,877	Valid
	X1.6	0,349	0,614	Valid
	X1.7	0,349	0,513	Valid
	X1.8	0,349	0,782	Valid
	X1.9	0,349	0,847	Valid
	X1.10	0,349	0,725	Valid
	X1.11	0,349	0,767	Valid
	X1.12	0,349	0,831	Valid
	X1.13	0,349	0,727	Valid
	X1.14	0,349	0,782	Valid

Variabel	Item	r_{tabel} (0,3494)	r_{hitung}	Keterangan
	X1.15	0,349	0,720	Valid
	X1.16	0,349	0,556	Valid
	X1.17	0,349	0,654	Valid
	X1.18	0,349	0,654	Valid
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0,349	0,806	Valid
	X2.2	0,349	0,810	Valid
	X2.3	0,349	0,901	Valid
	X2.4	0,349	0,773	Valid
	X2.5	0,349	0,886	Valid
	X2.6	0,349	0,866	Valid
	X2.7	0,349	0,797	Valid
	X2.8	0,349	0,791	Valid
	X2.9	0,349	0,794	Valid
	X2.10	0,349	0,818	Valid
	X2.11	0,349	0,768	Valid
	X2.12	0,349	0,692	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	X3.1	0,349	0,918	Valid
	X3.2	0,349	0,918	Valid
	X3.3	0,349	0,903	Valid
	X3.4	0,349	0,676	Valid
	X3.5	0,349	0,809	Valid
	X3.6	0,349	0,602	Valid

Merujuk pada hasil uji validitas, keseluruhan butir pernyataan kuesioner terbukti valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,3494$), terpenuhi pada seluruh butir, sehingga instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat kelayakan.

C. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,959	*Reliable*
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,936	*Reliable*
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	0,950	*Reliable*
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,892	*Reliable*

Mengacu pada hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* yang melampaui batas 0,60, dengan rentang nilai antara 0,892 sampai 0,959, sehingga semua instrumen kuesioner terbukti reliabel dan memenuhi kriteria kelayakan untuk keperluan analisis data lebih lanjut.

D. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			32
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,93862301
Most Extreme Differences	Absolute		,129
	Positive		,129
	Negative		-,097
Test Statistic			,129
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,191
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		,184
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,174
		Upper Bound	,194

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Dengan jumlah responden sebanyak 32 observasi, nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) sebesar 0,191 diperoleh dari hasil pengujian pada tabel di atas, di mana nilai ini melampaui taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu α = 0,05. Kondisi ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara distribusi data penelitian dengan pola sebaran normal secara teoritis, sehingga data residual dalam penelitian ini dapat dikategorikan berdistribusi normal.

E. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	VIF
1	(*Constant*)		
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,165	6,077
	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	,173	5,790
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,725	1,379

Tidak terdapatnya gejala multikolinearitas antar variabel independen dibuktikan dengan nilai *Tolerance* seluruh variabel independen yang melebihi 0,10 dan nilai VIF

yang berada di bawah 10. Atas dasar tersebut, model regresi dalam penelitian ini dianggap layak untuk diaplikasikan dalam analisis data selanjutnya.

F. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Glesjer

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	*(Constant)*	5,322	2,130		2,499	,019
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,024	,066	,155	,364	,718
	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	-,129	,092	-,586	-1,407	,170
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,045	,056	,164	,810	,425

a. *Dependent Variable*: Abs_RES

Tidak terdapatnya gejala heteroskedastisitas dibuktikan melalui hasil uji glesjer di atas, di mana nilai signifikansi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,718), Penerapan SPI (0,170), dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (0,425) seluruhnya berada di atas taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, sehingga model dinyatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

G. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,963	3,783		1,312	,200
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,135	,118	,159	1,143	,263
	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	,927	,163	,773	5,695	<,001
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,097	,100	,064	,973	,339

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Model regresi menghasilkan persamaan $Y = 4{,}963 + 0{,}135X_1 + 0{,}927X_2 + 0{,}097X_3$, di mana ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap APKD. Penerapan SPI (X_2) memiliki pengaruh terbesar (0,927), jauh melampaui Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (0,097) yang relatif kecil.

H. Hasil Uji t

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,963	3,783		1,312	,200
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,135	,118	,159	1,143	,263
	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	,927	,163	,773	5,695	<,001
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,097	,100	,064	,973	,339

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari uji t (t_{tabel} = 2,048), hanya Penerapan SPI yang memberikan pengaruh signifikan terhadap APKD (t_{hitung} = 5,695; sig. <0,001), sehingga H2 diterima. Sebaliknya, Pemanfaatan Teknologi Informasi (t = 1,143; sig. 0,263) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (t = 0,973; sig. 0,339) tidak berpengaruh signifikan, sehingga H1 dan H3 ditolak.

I. Hasil Uji F

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	df	*Mean Square*	F	Sig.
1	Regression	1189,963	3	396,654	95,328	<,001[b]
	Residual	116,506	28	4,161		
	Total	1306,469	31			

a. *Dependent Variable*: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. *Predictors: (Constant)*, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Uji F menunjukkan F_{hitung} = 95,328 > F_{tabel} = 2,93 dengan sig. <0,001, sehingga ketiga variabel independen (Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SPI, dan ALK)

secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap APKD pada OPD di Kota Medan, sehingga H4 diterima.

J. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	,954[a]	,911	,901	2,03984

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen tercermin dari nilai R sebesar 0,954 yang tergolong sangat kuat. Dari total variasi APKD, sebesar 91,1% berhasil diterangkan oleh ketiga variabel independen (R^2 = 0,911), sedangkan 8,9% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

A. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap APKD

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD di Kota Medan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Pemanfaatan TI. Meskipun secara deskriptif pemanfaatan teknologi berada pada kategori sangat baik, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi *baseline* yang merata di seluruh OPD, sehingga tidak memiliki variasi yang cukup sebagai faktor pembeda. Selain itu, teknologi lebih dimanfaatkan sebagai *compliance tool* untuk kegiatan operasional rutin, bukan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas informasi dan pengawasan. Akuntabilitas di lingkungan OPD lebih banyak didorong oleh regulasi yang mengikat seperti SAP dan pengawasan BPK, sehingga peran teknologi informasi lebih bersifat komplementer. Temuan ini didukung oleh Riyadi dan Kurnadi (2020), Rahmawati (2021), serta Pribadi dkk. (2025).

B. Pengaruh Penerapan SPI terhadap APKD

Koefisien regresi tertinggi sebesar 0,927 dimiliki oleh Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang terbukti berpengaruh signifikan dan menjadi variabel dominan. Kondisi ini karena SPI mencakup lima unsur yang saling terintegrasi sesuai PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang secara bersama-sama berfungsi sebagai mekanisme preventif, detektif, dan korektif. Melalui sudut pandang

teori keagenan, sistem ini memiliki fungsi menekan risiko *moral hazard* dan *adverse selection* dalam keterkaitan antara OPD sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Temuan ini konsisten dengan Puspitawati dan Effendy (2021), Priscilla dkk. (2022), serta Fuad dan Winarsih (2021).

C. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap APKD

Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, meskipun arah hubungannya positif. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa laporan keuangan per OPD belum diunggah ke *website* masing-masing OPD, dan akses pihak eksternal non-resmi masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan fungsi aksesibilitas sebagai sarana transparansi dan pengawasan eksternal belum berjalan optimal. Selama literasi keuangan masyarakat, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi hingga level OPD secara individual belum terwujud, ketersediaan akses semata tidak cukup mendorong peningkatan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan Shadrina dan Hidajat (2023) serta Mudjiyono dan Iswahyuni (2019).

D. Pengaruh Variabel Independen Secara Simultan terhadap APKD

Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap APKD dengan F_{hitung} = 95,328 dan R^2 = 0,911, artinya 91,1% variasi akuntabilitas mampu dijelaskan oleh model ini, sedangkan sisanya 8,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Ketiga variabel memiliki fungsi yang saling melengkapi: teknologi informasi menyediakan infrastruktur digital, SPI memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, dan aksesibilitas laporan keuangan menjembatani informasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Sinergi ketiganya membentuk sistem *checks and balances* yang komprehensif sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap akuntabilitas dibandingkan jika masing-masing variabel bekerja secara terpisah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SPI, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD di Kota Medan dilakukan dalam penelitian ini. Secara parsial, hanya Penerapan SPI yang ditemukan berpengaruh signifikan dan mendominasi model, sementara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak ditemukan berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, mampu menerangkan 91,1% variasinya, sedangkan 8,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Cakupan objek yang hanya terbatas pada OPD di Kota Medan dengan jumlah sampel yang relatif kecil menjadi keterbatasan penelitian ini, sehingga generalisasi hasil sebaiknya dilakukan secara hati-hati. Pemerintah Kota Medan dan OPD disarankan untuk memperkuat penerapan sistem pengendalian internal, mengoptimalkan teknologi informasi sebagai instrumen strategis, serta memperluas aksesibilitas laporan keuangan hingga ke level OPD secara individual disertai peningkatan literasi keuangan masyarakat. Bagi peneliti mendatang, perluasan cakupan wilayah dan jumlah sampel perlu dilakukan, serta dipertimbangkan pula variabel lain seperti kompetensi sdm, integritas aparatur, atau budaya organisasi yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

Aziiz, Muhammad Nur, dan Sawitri Dwi Prastiti. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6(2):334–44. doi:10.17977/um004v6i22019p334.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control – Integrated Framework*.

Defana, Fernanda Alivia, dan Sri Rahayu. 2023. "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021)." *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11(1).

Fauziyah, Miftahul Reza, dan Nur Handayani. 2017. "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(6).

Fuad, Khoirul, dan Winarsih Winarsih. 2021. "Direct and Indirect Testing for Accountability of Regional Financial Management and Trust Level of Public-Stakeholders in Local Government." *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 13(1):1–11. doi:10.17509/jaset.v13i1.33903.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 9 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hoesada, Jan. 2021. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.

Ikhsan, Arfan, Muhamad Yamin Noch, Sukma Lesmana, dan Pandapotan Ritonga. 2016. *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera.

Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3(4):305–60.

Mahmudi. 2016. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. 3 ed. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mandailing, Munawar. 2021. "Kejati Sumut tangkap mantan Kepala Bappeda Medan." https://sumut.antaranews.com/berita/449289/kejati-sumut-tangkap-mantan-kepala-bappeda-medan.

Mardiasmo. 2018. *Akuntabilitas sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Marlina, Evi, Sri Rahmayanti, dan Ameilia Dwi Rur Afdilah Futri. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 11(1):89–100. doi:10.37859/jae.v11i1.2517.

Mudjiyono, dan Yetti Iswahyuni. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Bingkai Ekonomi* 4(2):64–71.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008.

Pribadi, Kukuh Iqnatul, Selamet Eko Budi Santoso, Novi Dirgantari, dan Annisa Ilma Hartikasari. 2025. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Varibel Moderasi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13(1):39–52. doi:10.29103/jak.v13i1.18193.

Priscilla, Dea, Taufeni Taufik, dan A. Al Azhar. 2022. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak)." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6(2):180–90.

Puspitawati, Lilis, dan Mega Marisa Effendy. 2021. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung)." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 9(1):43–58. doi:10.34010/agregasi.v9i1.4372.

Rahmadani, Anisa. 2025. "Daftar 8 Pejabat OPD yang Dicopot Bobby Nasution, Termasuk Kepala Dinas yang Terjerat Kasus Korupsi." https://medan.tribunnews.com/2025/05/29/daftar-8-pejabat-opd-yang-dicopot-bobby-nasution-termasuk-kepala-dinas-yang-kasus-terjerat-korupsi.

Rahmawati, E. A. 2021. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Value For Money, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Opd Kabupaten Batang."

Riyadi, Wulan, dan Engkun Kurnadi. 2020. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3(2):160–68.

Shadrina, Hilyati Nurul, dan Sjarief Hidajat. 2023. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7(1):459. doi:10.33087/ekonomis.v7i1.873.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2 ed. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2014. *Pengantar teknologi informasi*. 1 ed. Yogyakarta: Andi.

Suyanto, M. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi untuk bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2008.

Warta BPK. 2024. "BPK Temukan 945 Permasalahan SPI dalam LKKL." https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-945-permasalahan-spi-dalam-lkkl/.

Waspada. 2025. "Dugaan Korupsi Solar Industri Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Mencuat." https://www.waspada.id/medan/dugaan-korupsi-solar-industri-dinas-lingkungan-hidup-kota-medan-mencuat/.

Zimmerman, Jerold L. 1977. “The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives.” *Journal of Accounting Research* 15:107. doi:10.2307/2490636.